

# Sektor Kehutanan

Berdasarkan penafsiran citra satelit dan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) per Desember 2010, dari 110.769 juta ha area yang ditentukan sebagai kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi, 30.384 juta ha sudah menjadi kawasan non-hutan. Sementara itu, 10.612 juta ha dari 22.745 juta ha HPK (Hutan Produksi Konversi) masih memiliki tutupan hutan. Keadaan ini menunjukkan potensi pengurangan emisi dari sektor kehutanan apabila kebijakan yang disusun dapat memberikan insentif ke arah pengurangan areal IUPHHK-HA agar dapat dikonversi menjadi hutan lindung. Pada saat yang bersamaan, sebagian kecil area HPK dapat diubah menjadi IUPHHK-HTI untuk memastikan bahwa produktivitas sektor kayu Indonesia terus mampu bersaing di pasar internasional, yang memang menunjukkan perubahan ke arah lebih banyak permintaan untuk *pulp and paper* daripada untuk kayu hutan.

## Level 1

Level 1 mengasumsikan bahwa dilepasnya moratorium mengakibatkan luasan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI meningkat sebesar 10% pada tahun 2050 menjadi 25,8 dan 11,3 juta ha.

## Level 2

Level 2 mengasumsikan bahwa luasan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI pada tahun 2050 tidak berubah dari kondisi tahun 2011.

## Level 3

Level 3 mengasumsikan bahwa sektor kehutanan Indonesia berfokus pada menambah luas area IUPHHK-HTI sebesar 10% menjadi 11,3 juta ha dan mengurangi luas area IUPHHK-HA sebesar 25% menjadi 17,5 juta ha.

## Level 4

Level 4 mengasumsikan bahwa sektor kehutanan Indonesia berfokus pada menambah luas area IUPHHK-HTI sebesar 20% menjadi 12,3 juta ha dan mengurangi luas area IUPHHK-HA sebesar 50% menjadi 11,75 juta ha.



Sumber: <http://www.hijauku.com/2013/03/21/2013-tahun-kritis-tata-kelola-hutan-indonesia/>

